JPIM: Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner
Vol. 03, No. 02, Tahun 2026, Hal. 551 -558, ISSN: 3089-0128 (Online)

Menakar Dampak SDGs *Integrasi Kebijakan, Evaluasi, dan Praktik Implementasi*

Agista Febriyanti[1], M. Alfan Fauzi[2], Indra Panca Putra[3], Muhamad Raffli Arya[4], Siti Nurhasanah[5], Novita[6]
Program Studi Magister Ekonomi Syariah, STEBI Global Mulia, Cikarang, Indonesia
agistafeb2000@gmail.com, muhammadraffli12ajap@gmail.com, alvanfauzi800@gmail.com, indrapanca900@gmail.com, sitinurhasanahbms@gmail.com

Article Info

Article history:
Received Oktober 24, 2026
Revised November 05, 2026
Accepted November 15, 2026

Keywords:
Sustainable Development Goals (SDGs), policy integration, evaluation mechanisms, implementation quality, sustainable development

ABSTRACT

Sustainable development faces complex challenges in balancing economic growth, environmental preservation, and social well-being amid the dynamics of national and global policy. This article aims to comprehensively examine the integration of policy instruments, evaluation mechanisms, and implementation quality in achieving the Sustainable Development Goals (SDGs). Through a literature review and policy analysis drawing on various recent academic sources, this study identifies that the effectiveness of achieving the SDG targets depends heavily on aligning regulations from the national to the local level such as environmental analysis and evaluation based on empirical data—play a crucial role as control mechanisms to ensure that development programmes are appropriately targeted. The synthesis of the literature shows that, although the policy framework has been systematically designed in conceptual terms, the main challenges are often found in bureaucratic consistency, the measurability of indicators, and the optimisation of budget allocation. Therefore, strengthening cross-sectoral synergies, ensuring transparent monitoring, and increasing stakeholder participation are key to bridging the gap between policy ideals and successful implementation in practice

This is an open access article under the CC BY-SA license.

Article Info

Article history:
Received Oktober 24, 2026
Revised November 05, 2026
Accepted November 15, 2026

Keywords:

Sustainable Development Goals (SDGs), Integrasi Kebijakan, Mekanisme Evaluasi, Kualitas Implementasi, Pembangunan Berkelanjutan.

ABSTRAK

Pembangunan berkelanjutan menghadapi tantangan kompleks dalam menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan kesejahteraan sosial di tengah dinamika kebijakan nasional maupun global. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif mengenai integrasi instrumen kebijakan, mekanisme evaluasi, dan kualitas implementasi dalam pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Melalui pendekatan studi literatur dan analisis kebijakan dari berbagai sumber akademik mutakhir, penelitian ini mengidentifikasi bahwa efektivitas pencapaian target SDGs sangat bergantung pada penyelarasan regulasi tingkat pusat hingga daerah, penguatan kapasitas kelembagaan, analisis lingkungan dan evaluasi berbasis data empiris berperan krusial sebagai alat kontrol untuk memastikan program pembangunan berjalan tepat sasaran. Hasil sintesis literatur menunjukkan bahwa meskipun secara konseptual kerangka kebijakan telah dirancang secara sistematis, tantangan utama kerap ditemukan pada aspek konsistensi birokrasi, keterukuran indikator, serta optimalisasi alokasi anggaran. Oleh karena itu, penguatan sinergi lintas sektor, transparansi monitoring, dan peningkatan partisipasi pemangku kepentingan menjadi kunci utama dalam menjembatani antara idealisme kebijakan dan keberhasilan implementasi di lapangan

JPIM: Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner
Vol. 03, No. 02, Tahun 2026, Hal. 551 -558, ISSN: 3089-0128 (Online)

This is an open access article under the CC BY-SA license.

Corresponding Author:
Agista Febriyanti
STEBI Global Mulia
E-mail: agistafeb2000@gmail.com

Pendahuluan

Pembangunan berkelanjutan telah menjadi agenda global yang sangat penting dalam upaya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan kesejahteraan sosial. Sebagaimana dikemukakan oleh Rolib Sitorus dan Japansen Sinaga, pembangunan berkelanjutan berfokus pada keseimbangan pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan sosial, di mana Indonesia sebagai negara dengan keragaman yang besar menghadapi tantangan kompleks dalam mencapai target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). (Fadil et al., 2023) Dalam praktiknya, proses pembangunan kerap kali diwarnai oleh permasalahan sosial dan degradasi lingkungan akibat orientasi yang terlalu bertumpu pada pertumbuhan ekonomi semata. Oleh karena itu, diperlukan strategi baru melalui penerapan prinsip-prinsip pembangunan berbasis manusia dan ekologi.

Upaya lokalisasi SDGs di tingkat lokal dan perdesaan telah diatur melalui kerangka regulasi yang jelas, seperti pemanfaatan peraturan menteri desa terkait pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang mencantumkan 18 tujuan SDGs Desa sebagai arah kebijakan. Integrasi pembangunan berkelanjutan ke dalam perencanaan strategis daerah maupun desa terbukti mampu meningkatkan efektivitas perancangan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi, hingga pelaporan pencapaian tujuan. Sejalan dengan hal tersebut, berbagai instrumen pengukuran dan evaluasi—seperti analisis dampak lingkungan (AMDAL) yang dikaji oleh (Saputra et al., 2025) pendekatan analisis laba-rugi sosial (SROI) oleh Tornanda Syaifullah dkk., serta tata kelola tata ruang—sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa program-program yang dijalankan benar-benar efektif dan tepat sasaran.

Kendati kerangka regulasi telah dirancang secara sistematis, implementasi di lapangan sering kali menghadapi berbagai hambatan serius. Tantangan tersebut meliputi inkonsistensi birokrasi, keterbatasan alokasi anggaran, rendahnya tingkat partisipasi masyarakat secara bermakna, serta lemahnya sistem pengawasan yang membuat instrumen kebijakan kerap berhenti sebagai formalitas administratif. Ketimpangan pencapaian indikator di berbagai wilayah, sebagaimana dianalisis dalam studi implementasi di berbagai daerah oleh (Aminda et al., 2024) serta (Hazin et al., 2024) menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap kualitas implementasi kebijakan yang ada.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini menjadi sangat penting dan mendesak untuk dilakukan guna mengkaji secara mendalam bagaimana integrasi instrumen kebijakan, mekanisme evaluasi, dan kualitas implementasi dapat berjalan selaras. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menganalisis strategi penyelarasan kebijakan serta mengevaluasi efektivitas instrumen pengukuran dampak SDGs agar dapat menjembatani antara idealisme regulasi dan keberhasilan nyata di tingkat operasional.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-analitis yang dipadukan dengan studi literatur untuk membedah secara menyeluruh bagaimana kebijakan Sustainable Development Goals (SDGs) diintegrasikan dan dievaluasi. Desain ini mengadopsi model pendekatan yang digunakan oleh (Afida & Maftuhah, 2026) serta Sitorus dan Sinaga, di mana analisis difokuskan pada dokumen regulasi, tata kelola pemerintahan, serta dinamika ekosistem pembangunan secara nasional maupun daerah. Untuk memberikan gambaran yang lebih utuh pada aspek praktik implementasinya, penelitian ini juga mengadaptasi kerangka metode campuran yang dicontohkan oleh (Asdiani et al., 2025) yang memungkinkan peneliti untuk memvalidasi temuan kebijakan level makro dengan realitas dampak kesejahteraan di tingkat mikro. Dalam upaya memperoleh data yang komprehensif, peneliti melakukan pengumpulan data primer dan sekunder secara beriringan. Pengumpulan data sekunder berpusat pada teknik studi pustaka dan penelaahan rekam jejak dokumen strategis. Proses penggalian data ini merujuk pada pedoman yang diterapkan oleh Muslim dkk. dan Fadil dkk., yakni dengan mengkaji berbagai laporan resmi institusi pemerintah, rencana aksi daerah, serta literatur akademik yang merujuk pada indikator keberhasilan SDGs.

Peneliti mengaplikasikan pendekatan tinjauan pelingkupan (scoping review) serta analisis konten untuk memetakan dokumen-dokumen kebijakan, serupa dengan strategi pengumpulan data yang dijalankan oleh (Meila et al., 2024) dan (Saputra et al., 2025) guna mendapatkan basis data yang kuat terkait instrumen pencegahan dan kontrol keberlanjutan.Perolehan data primer dalam penelitian ini bertumpu pada teknik observasi, pengumpulan dokumentasi operasional, dan wawancara mendalam dengan berbagai pemangku kepentingan kunci di lapangan. (Arif WICAKSONO LUSI NURBAITI, IRMA ARLINI D, 2022) Langkah penggalian informasi secara langsung ini sangat sejalan dengan metode kualitatif yang diimplementasikan oleh Siagian dan Sitorus, di mana rekaman hasil wawancara bersama pihak pelaksana program (aparatur desa/pemerintah) dan warga masyarakat dikonversi menjadi transkrip naratif guna mengungkap kendala riil, kapabilitas institusi, serta bentuk partisipasi elemen masyarakat secara nyata.Untuk tahapan analisis dari data yang telah diperoleh, peneliti menggunakan kerangka evaluasi kebijakan publik secara holistik.
Mengacu pada pedoman kajian (Hazin et al., 2024) proses penelaahan data dititikberatkan pada pengukuran indikator efektivitas, efisiensi, pemerataan, dan responsivitas atas pelaksanaan program-program SDGs. Data kualitatif mentah yang terkumpul kemudian diproses melalui tahapan reduksi informasi, kategorisasi atau penyusunan koding tema-tema utama, hingga interpretasi makna. Di samping itu, penelitian ini turut menggunakan pisau analisis segitiga kebijakan (policy triangle analysis) yang disarankan oleh (Hazin et al., 2024) dalam riset lainnya, sehingga peneliti mampu mengukur secara objektif keselarasan antara perumusan agenda kebijakan di atas kertas dengan dinamika eksekusinya di akar rumput.

Hasil

Berdasarkan hasil penelusuran dan tinjauan terhadap berbagai literatur yang relevan, implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di Indonesia memperlihatkan dinamika yang kompleks antara perumusan kebijakan, pelaksanaan di lapangan, dan instrumen evaluasinya. Hasil sintesis dari temuan-temuan para peneliti diuraikan ke dalam tiga aspek utama: praktik implementasi tingkat lokal, integrasi kebijakan strategis, dan efektivitas instrumen evaluasi. Praktik Implementasi dan Dampak Kesejahteraan di Tingkat Desa.

Di tingkat akar rumput, (Patiung, 2019)penerapan SDGs yang berfokus pada pemberdayaan terbukti mampu memberikan dampak ekonomi secara langsung. Penelitian yang dilakukan oleh Harlinda Asdiani dkk. di Desa Durian menunjukkan bahwa program berbasis SDGs secara signifikan berhasil mendongkrak rata-rata pendapatan rumah tangga melalui

penguatan kapasitas masyarakat. Namun, konsistensi keberhasilan ini sangat bergantung pada kualitas tata kelola di masing-masing daerah. Studi kasus terkait pemanfaatan dana desa di Desa Hanura memperlihatkan bahwa keberhasilan awal dalam pengentasan kemiskinan dapat kembali memburuk pada periode selanjutnya apabila manajemen manajerial tidak efektif dan minimnya partisipasi warga. Senada dengan hal tersebut, (Siagian & Sitorus, 2024) dan (Siagian & Sitorus, 2024) menyoroti bahwa inovasi melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sangat potensial untuk mewujudkan kemandirian ekonomi dan pengadaan air bersih, meskipun dalam praktiknya sering terhambat oleh keterbatasan anggaran dan rendahnya partisipasi masyarakat setempat. Integrasi Kebijakan dan Tata Kelola Nasional

Integrasi nilai-nilai keberlanjutan ke dalam perencanaan wilayah menuntut sinkronisasi regulasi dari pusat hingga daerah. (Sugandi et al., 2022) menegaskan bahwa peraturan pemerintah seperti Pedoman Pembangunan Desa menjadi fondasi krusial bagi pemerintah lokal untuk memetakan arah kebijakan yang berwawasan lingkungan dan sosial. Dalam sektor krusial seperti pendidikan, (Hazin et al., 2024) mengonfirmasi bahwa kebijakan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Desa telah sukses memfasilitasi akses pendidikan bagi masyarakat perdesaan, yang secara langsung berkolerasi positif terhadap pencapaian target pengentasan kemiskinan dan ketersediaan pekerjaan layak. Meskipun demikian, dinamika kebijakan moneter seperti realokasi anggaran pendidikan yang dikaji oleh (Afida & Maftuhah, 2026) dan (Afida & Maftuhah, 2026) memberi peringatan bahwa efisiensi dana darurat dapat memicu ketimpangan kualitas pelayanan jika tidak dimitigasi dengan baik. Tantangan struktural ini turut ditegaskan oleh (Sitorus & Sinaga, 2024) dan (Sitorus & Sinaga, 2024) yang melihat bahwa kesenjangan sosial ekonomi dan lemahnya koordinasi antar-sektor masih menjadi rintangan utama pencapaian lima pilar besar SDGs di Indonesia.

Instrumen Pengukuran dan Pengendalian Lingkungan untuk menjamin agar pertumbuhan tidak merusak ekosistem, evaluasi kebijakan wajib diperkuat dengan instrumen perlindungan lingkungan yang ketat. (Saputra et al., 2025) mengungkapkan bahwa Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) secara konseptual sangat esensial untuk menjaga ketahanan air dan aksi iklim, namun di lapangan kerap terdegradasi menjadi sekadar formalitas administratif karena longgarnya penegakan hukum. Sebagai solusi metodologis untuk evaluasi, (Syaifullah et al., 2024) membuktikan bahwa metode Social Return on Investment (SROI) merupakan alat ukur yang paling komprehensif untuk mengkalkulasi efektivitas program berbasis kelautan dan perikanan secara berkesinambungan. Dari perspektif makroekonomi, (Meila et al., 2024) memproyeksikan bahwa penerapan instrumen fiskal seperti pajak karbon mampu mendorong industri beralih ke ekonomi hijau, yang pada akhirnya menekan angka emisi gas rumah kaca sekaligus menambah kas negara untuk mendanai program SDGs secara mandiri.

Tabel 1. Ringkasan Identitas dan Hasil Evaluasi Kebijakan SDGs

No	Peneliti & Tahun (Judul/Identitas)	Fokus & Temuan Utama (Judul/Identitas)
1	(Asdiani et al., 2025) Evaluasi Penerapan SDGs Terhadap Pendapatan Per Kapita	Implementasi program SDGs sukses menekan kemiskinan dan meningkatkan pendapatan rumah tangga secara signifikan di tingkat desa, didukung oleh sinergi aparatur dan warga.

2	(Sugandi et al., 2022) Analysis of The Sustainable Development Policies	Lokalisasi SDGs lewat kebijakan pedoman desa sangat penting untuk membangun kesadaran lingkungan dan menyinergikan tujuan pemerintah pusat dengan perencanaan lokal.
3	(Saputra et al., 2025) Peran Analisis Dampak Mengenai Lingkungan	AMDAL krusial sebagai tameng pencegahan perusakan lingkungan demi mencapai target iklim dan tata kota, namun efektivitasnya tergerus oleh formalitas birokrasi dan lemahnya hukum.
4	(Hazin et al., 2024) *The Impact of the Village Recognition of Prior Learning*	Kebijakan RPL Desa berhasil mendorong kemajuan SDM lewat pendidikan berkualitas (SDG 4) yang berimbas pada perluasan peluang ekonomi, meskipun pemerataan program masih menjadi PR.
5	(Siagian & Sitorus, 2024) Analisis Implementasi SDGs Melalui BUMDes	BUMDes mampu menjadi penggerak penyediaan sanitasi bersih dan lapangan kerja, meski optimalisasinya terhambat kurangnya pendanaan dan inisiatif swadaya masyarakat.
6	(Meila et al., 2024)Penerapan Pajak Karbon dalam Mewujudkan SDGs	Penerapan pajak emisi berhasil mendorong transisi ke ekonomi hijau secara sistemik serta memberikan potensi pendapatan negara yang dapat diputar kembali untuk membiayai target SDGs.
7	(Syaifullah et al., 2024) Eksplorasi Metode SROI Sebagai Alat Pengukuran Dampak	Kerangka ukur SROI (*Social Return on Investment*) direkomendasikan sebagai instrumen paling andal untuk memonitor dampak riil program ekonomi biru pada aspek ekonomi dan sosial.

Pembahasan

Keberhasilan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di Indonesia sangat bertumpu pada kemampuan menerjemahkan agenda makro global ke dalam aksi nyata di tingkat lokal, serta mengawal proses tersebut melalui instrumen evaluasi yang ketat. Berdasarkan temuan data pada bagian hasil, terlihat adanya paradoks antara tingginya komitmen di atas kertas dengan realitas implementasi dan tata kelola di lapangan. Analisis dari(Sugandi et al., 2022) menegaskan bahwa regulasi pemerintah pusat terkait pedoman desa merupakan fondasi awal yang baik untuk melokalisasi SDGs, namun keberhasilannya sangat ditentukan oleh kesiapan institusi lokal. Fenomena ini terkonfirmasi oleh temuan (Asdiani et al., 2025) di Desa Durian, di mana program berbasis SDGs terbukti efektif menaikkan taraf ekonomi warga karena diimbangi dengan penguatan kapasitas kelembagaan. Sebaliknya, kasus di Desa Hanura dan temuan (Siagian & Sitorus, 2024) menunjukkan bahwa keberadaan dana desa dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) seringkali gagal mempertahankan tren positif pengentasan kemiskinan apabila tidak dibarengi dengan literasi manajerial dan partisipasi aktif masyarakat. Hal ini mengindikasikan bahwa injeksi finansial semata tidak akan menciptakan keberlanjutan tanpa adanya modal sosial dan tata kelola pemerintahan desa yang partisipatif.

Lemahnya kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan persoalan koordinasi yang disoroti oleh Rolib Sitorus dan Japansen Sinaga menjadi benang merah mengapa banyak target SDGs di daerah berjalan lambat. (Swantoro et al., 2025) Sebagai respons terhadap krisis SDM tersebut, intervensi kebijakan seperti Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Desa yang dianalisis oleh Mufarrihul Hazin dkk. hadir sebagai solusi strategis. Kebijakan ini dinilai sebagai langkah jitu untuk mengakselerasi SDG 4 (Pendidikan Bermutu) yang bermuara pada

peningkatan SDG 8 (Pekerjaan Layak). Namun, dinamika tata kelola nasional kerap memunculkan tantangan baru yang kontraproduktif. (Afida & Maftuhah, 2026) mengungkap bahwa kebijakan realokasi anggaran pendidikan demi merespons krisis global justru berpotensi memicu ketimpangan layanan di daerah.

Kondisi ini (Purwitasari & Sriyono, 2025) membuktikan bahwa ekosistem pembangunan di Indonesia masih sangat rentan terhadap guncangan fiskal. Kebijakan yang bersifat reaktif dan tambal-sulam dapat menggerus fondasi pembangunan manusia yang seharusnya menjadi prasyarat mutlak bagi tercapainya indikator-indikator SDGs lainnya. Lebih jauh, pembahasan mengenai SDGs tidak bisa dilepaskan dari aspek daya dukung lingkungan. Pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif tidak boleh berakhir pada degradasi ekologis. (Saputra et al., 2025) memberikan alarm kritis bahwa instrumen pencegahan seperti AMDAL mulai kehilangan tajinya akibat pergeseran regulasi dan lemahnya penegakan hukum hukum, sehingga sering kali tereduksi menjadi sekadar prasyarat administratif. Untuk menambal celah kelemahan regulasi konvensional tersebut, diperlukan instrumen kebijakan berbasis pasar dan evaluasi metodologis yang lebih terukur. Penerapan pajak karbon yang direkomendasikan oleh Kaca (Meila et al., 2024) merupakan salah satu alternatif intervensi fiskal yang pro-keberlanjutan guna memaksa industri beralih ke praktik ekonomi hijau.

Pada tataran evaluasi, narasi keberlanjutan harus didukung oleh metrik pengukuran yang saintifik agar terhindar dari bias pelaporan. (Purwitasari & Sriyono, 2025) menegaskan bahwa pengungkapan SDGs oleh entitas korporat memerlukan standar yang objektif agar tidak berhenti pada klaim normatif semata. Di ranah implementasi program publik, (Syaifullah et al., 2024) menawarkan solusi aplikatif berupa metode Social Return on Investment (SROI) sebagai alat ukur efektivitas. Penggunaan metode semacam SROI memungkinkan pemerintah dan para pemangku kepentingan untuk mengkalkulasi secara pasti seberapa besar nilai sosial dan lingkungan yang tercipta dari setiap rupiah yang diinvestasikan. Secara keseluruhan, integrasi yang harmonis antara kebijakan SDM yang konsisten, penegakan hukum lingkungan yang tanpa kompromi, dan penerapan alat ukur dampak yang komprehensif adalah kunci utama untuk mentransformasi visi SDGs dari sekadar dokumen perencanaan menjadi realitas kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Simpulan

Berdasarkan analisis komprehensif terhadap integrasi kebijakan, praktik implementasi, dan instrumen evaluasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), (Iksan et al., 2025) (Tristiarto et al., 2024) dapat disimpulkan bahwa pencapaian target SDGs di Indonesia menuntut sinergi yang utuh antara regulasi makro dan eksekusi tata kelola di tingkat lokal. Pada ranah praktik implementasi, lokalisasi program SDGs terbukti mampu memberikan dampak nyata dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat perdesaan. Sebagaimana dibuktikan oleh (Asdiani et al., 2025) serta (Siagian & Sitorus, 2024) optimalisasi dana desa dan BUMDes sukses menciptakan lapangan kerja dan akses sanitasi. Kendati demikian, efektivitas capaian ini sangat bergantung pada kuatnya partisipasi masyarakat dan literasi manajerial aparatur daerah, agar keberhasilannya tidak bersifat sementara seperti fluktuasi dampak pengelolaan dana di Desa Hanura.

Dari aspek integrasi kebijakan, keberhasilan SDGs bertumpu pada harmonisasi aturan yang mampu menjawab tantangan kesenjangan sosial dan ekonomi, seperti yang ditekankan oleh (Sugandi et al., 2022). Intervensi kebijakan yang spesifik dan terarah, seperti program

Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Desa yang dikaji oleh (Hazin et al., 2024) maupun penerapan instrumen fiskal berupa pajak karbon rumusan(Meila et al., 2024) berhasil menjadi katalisator bagi peningkatan mutu sumber daya manusia dan pendorong transisi industri menuju ekonomi hijau. Meskipun begitu, fleksibilitas kebijakan nasional, seperti dinamika realokasi anggaran pendidikan yang disorot oleh (Afida & Maftuhah, 2026) dan (Afida & Maftuhah, 2026), harus dikawal dengan hati-hati agar niat efisiensi tidak berujung pada melebarnya disparitas kualitas layanan dasar di berbagai wilayah.

Pada tahap akhir, tujuan pembangunan tidak akan terukur tanpa adanya sistem evaluasi dan instrumen pengendalian yang ketat. Merujuk pada peringatan (Saputra et al., 2025) instrumen perlindungan lingkungan seperti AMDAL harus ditegakkan fungsi preventifnya secara tegas dan tidak boleh terdegradasi menjadi sekadar formalitas administratif. Ke depannya, kebijakan SDGs harus dievaluasi menggunakan indikator yang objektif dan saintifik, seperti penerapan metode Social Return on Investment (SROI) yang digagas oleh (Syaifullah et al., 2024) serta penguatan standar pelaporan korporasi yang diusulkan oleh (Purwitasari & Sriyono, 2025). Melalui kolaborasi antara integrasi kebijakan yang inklusif, praktik implementasi yang partisipatif, (Aminda et al., 2024)serta instrumen evaluasi yang presisi, visi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat dapat direalisasikan sepenuhnya.

Daftar Pustaka

Afida, F. N. N., & Maftuhah, S. (2026). Analisis Dampak Realokasi Anggaran Pendidikan dan Dinamika Ekosistem Pendidikan Nasioanl terhadap Sustainable Development Goals (SDGs) Indonseia. In *Madrasah Ibtidaiyah Education Journal*. https://doi.org/10.63321/miej.v3i2.156

Aminda, R. S., Aminda, A., & Rizki, M. (2024). Analisa capaian pelaksanaan pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi dalam sustainable development goals (sdgs) di kabupaten bogor. In *SinkrOn*. https://doi.org/10.32832/jpmuj.v2i2.2279

Arif WICAKSONO LUSI NURBAITI, IRMA ARLINI D, R. H. (2022). Analisis Keselarasan Program Kampung Lauk Di Kecamatan Bogor Barat Untuk Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Tpb/Sdgs) Melalui Pendekatan Geospasial. In *Jurnal Teknik | Majalah Ilmiah Fakultas Teknik UNPAK*. https://doi.org/10.33751/teknik.v23i2.6851

Asdiani, H., Johari, H. I., Ibrahim, I., & Sukuryadi, S. (2025). evaluasi penerapan tujuan pembangunan berkelanjutan (sdgs) terhadap peningkatan pendapatan per kapita di desa durian, kabupaten lombok tengah. in *Geography*. https://doi.org/10.31764/geography.v13i2.31735

Fadil, K., Suhendra, S., & Amran, A. (2023). Analisis Kebijakan Pendidikan Negara-negara ASEAN dalam Mendukung Suistanable Developments Goal. In *ISLAMIKA*. https://doi.org/10.36088/islamika.v5i1.2778

Hazin, M., Yani, M., Sholeh, M., Wahyudi, W., Rahmawati, N. W. D., & Suyatno, S. (2024). The Impact of the Village Recognition of Prior Learning on Sustainable Development: A Comprehensive Policy Evaluation. In *Journal of Management World*. https://doi.org/10.53935/jomw.v2024i4.609

Iksan, L. O. M. I. Y., Ismail, A., & Nuva, N. (2025). Alternatif Strategi Kebijakan Keberlanjutan Budi Daya Rumput Laut di Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi. In *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*. https://doi.org/10.15578/jksekp.v15i1.14300

Meila, K. D., Dianty, A., & Veronica, L. (2024). Penerapan Pajak Karbon dalam Mewujudkan Sustainability Development Goals Serta Dampaknya Terhadap Penerimaan Pajak di Indonesia. In *Owner*. https://doi.org/10.33395/owner.v8i2.2001

Patiung, M. (2019). analisis permasalahan, isu strategis dan kebijakan pembangunan sdgs kabupaten mojokerto. In *Jurnal Ilmiah Sosio Agribis*. https://doi.org/10.30742/jisa.v19i1.686

Purwitasari, O., & Sriyono. (2025). Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Leverage dan Profitabilitas Terhadap Pengungkapan Sustainable Development Goals (SDGs). In *Nominal, Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen*. https://doi.org/10.21831/nominal.v14i2.87284

Saputra, E., Annisa, N., Rizky, M., & Darmawan, C. (2025). Peran Analisis Dampak Mengenai Lingkungan dalam Mewujudkan Tujuan Sustainable Development Goals (SDGs). In *SOSIAL: Jurnal Ilmiah Pendidikan IPS*. https://doi.org/10.62383/sosial.v2i4.1375

Siagian, G. J. A., & Sitorus, A. B. (2024). Analisis implementasi sustainable development goals (sdgs) desa melalui pengembangan badan usaha milik desa (bumdes). In *Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik*. https://doi.org/10.51622/jispol.v4i1.2382

Sitorus, R., & Sinaga, J. (2024). Regulations, Policies, and Governance in Achieve Sustainable Development Goals. In *Indonesian Journal of Interdisciplinary Research in Science and Technology*. https://doi.org/10.55927/marcopolo.v2i5.8907

Sugandi, I., Abdoellah, O., & Gunawan, B. (2022). Analysis of The Sustainable Development Policies of Local Communities in Indonesia. In *TRANSFORMASI Jurnal Manajemen Pemerintahan*. https://doi.org/10.33701/jtp.v14i2.2258

Swantoro, A., Karjoko, L., Handayani, I., Hutabarat, S., & Fransiska, A. (2025). The Evaluating Relocation Policy Impact on the Sustainable Development Goals (SDGs): A Case Study of Liquefaction Victims in Petobo Village, Central Sulawesi. In *Journal of Lifestyle and SDGs Review*. https://doi.org/10.47172/2965-730x.sdgsreview.v5.n05.pe06671

Syaifullah, T., Saptono, A., & Purnawa, D. (2024). Eksplorasi Metode Sroi Sebagai Alat Pengukuran Dampak Program Kelautan Perikanan Untuk Pembangunan BerkelanjutaN. In *Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia*. https://doi.org/10.15578/jkpi.16.1.2024.61-71

Tristiarto, Y., Wahyudi, W., & Sugianto, S. (2024). Analisis Penerapan Sustainable Development Goals (SDGs) dan Sustainability Report Terhadap Profitabilitas Perusahaan Di Indonesia. In *IKRAITH-EKONOMIKA*. https://doi.org/10.37817/ikraith-ekonomika.v7i2.3352